



Tunjangan Kerja Dinamis Jadi Contoh

PENERAPAN tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan contoh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk diterapkan di daerah lain.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan TKD dinamis bisa meningkatkan motivasi kerja bagi PNS meski angka pemberiannya berbeda-beda sesuai kemampuan daerah masing-masing.

Selain memotivasi, Yuddy menilai dengan TKD tinggi, otomatis taraf kompetensi PNS yang dimiliki akan meningkat seiring dengan pemberian bobot kerja yang juga meningkat. Hal itu berimbas positif, yakni PNS akan menjadi profesi yang diisi oleh orang yang memiliki kompetensi unggul.

“Ada hal positif kemudian memiliki sumber manusia yang unggul, karena hanya orang-orang yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi yang akan masuk ke DKI. Di sisi lain, gubernur memiliki kewenangan besar untuk memberhentikan pegawai yang berkinerja buruk. Gajinya tinggi, kalau berkinerja buruk, wajar kan diberhentikan,” kata Yuddy di Balai Kota DKI, kemarin.

Pendapatan besar

Menurut Yuddy, pemberian TKD dinamis besar di DKI tidak datang dengan sendirinya. DKI merupakan provinsi dengan pendapatan yang cukup besar hingga mencapai Rp52 triliun tahun lalu. Oleh sebab itu, wajar dan tidak menyalahi undang-undang jika bisa memberikan tunjangan yang besar bagi pegawainya.

Yuddy juga memuji sistem

Hanya orang-orang yang memiliki tingkat kompetensi tinggi yang masuk ke DKI. Di sisi lain, gubernur memiliki kewenangan memberhentikan pegawai yang kinerjanya buruk.

pemotongan untuk tindak pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan untuk mengontrol para PNS meski telah diberi tunjangan yang besar. Yuddy pun ingin segera menerapkan pola lelang jabatan terbuka bagi PNS di daerah lain yang telah dilakukan juga oleh DKI.

Proses seleksi itu, menurut Yuddy, sudah sesuai dengan UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kata Yuddy, UU tersebut baru bisa diimplementasikan secara menyeluruh setelah dibuat peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan teknis. Yuddy pun menargetkan bisa melaksanakan UU tersebut pada April.

“Rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang sudah jalan ada dua, yaitu tentang manajemen PNS dan manajemen PNS dengan perjanjian kerja. Masih ada empat RPP lagi yang akan kita selesaikan kira-kira bulan Maret,” ujar Yuddy.

Yuddy pun memuji penghematan yang dilakukan Pemprov DKI dengan mencoret anggaran honorarium. Ia melihat, dengan pencoretan honorarium, meski APBD terbilang besar ketimbang daerah lain yakni Rp73,08 triliun, anggaran belanja pegawai disebut rendah, hanya 24%.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun menilai seleksi terbuka serta penghapusan honorari-

um untuk dialihkan menjadi TKD dinamis dilakukan untuk menghindari pembengkakan anggaran akibat permainan oknum PNS di berbagai instansi. Ahok pun mengaku pelaksanaan berbagai kebijakan terkait dengan penataan birokrasi dan kepegawaian bukan tanpa hambatan.

“Tidak apa-apa karena ini pasti terjadi gesekan. Tidak apa-apa kalau dia tidak bisa *input* kan tidak mengganggu TKD (statis)-nya. TKD dinamis ini kan tambahan. Kalau tidak bisa, ya sudah TKD statis saja,” tukas Ahok. (Put/J-1)